

Pemerintah Tambah Penerima Harga Gas Khusus

Oleh Retno Ayuningtyas

► JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menerbitkan revisi Keputusan Menteri (Kepmen) terkait harga gas khusus US\$ 6 per juta british thermal unit (*million british thermal unit*/MMBTU) untuk pembangkit listrik. Kementerian ESDM akan menambah perusahaan penerima harga gas khusus ini, yakni PT Krakatau Daya Listrik (KDL).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadiji menuturkannya, dalam Kepmen ESDM No 91K/12/MEM/2020, KDL memang belum termasuk penerima harga gas khusus. Namun, pihaknya akan memasukkan KDL dalam daftar penerima harga gas khusus dalam revisi Keputusan tersebut.

“Untuk Krakatau Daya Listrik ini yang akan kami masukkan dalam revisi Kepmen. Harapannya minggu ini selesai,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (24/3).

KDL disebutkan telah menyampaikan usulannya. Selain meminta harga gas US\$ 6 per MMBTU, KDL juga mengusulkan kenaikan alokasi gas ke depannya. Rincinya, KDL mengusulkan alokasi gas sebesar 11,5 miliar british thermal unit per hari (*billion british thermal unit per day*/BBTUD) untuk 2021-2022 dan meningkat menjadi 20,4 BBTUD pada 2023-2024.

Di sisi lain, lanjutnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menghitung ketersediaan pasokan gas. Hasil hitungan pasokan untuk KDL ini yakni 11,5 BBTUD untuk 2021-2022 dan 17,5 BBTUD untuk 2023.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Suko Hartono mengungkapkan, terkait implementasi harga US\$ 6 per MMBTU untuk KDL, pihaknya siap mengeksekusinya begitu revisi Kepmen diterbitkan pemerintah. Pasca adanya perubahan beleid, pihaknya akan membahas perubahan perjanjian jual beli gas dengan KDL. “Untuk pasokan sudah ada. Kami menunggu perubahan Kepmen 91/2020,” tutur Suko.

Dalam kesempatan yang

sama, Direktur Utama KDL Agus Nizar Vidiansyah menjelaskan, perusahaannya tidak hanya memasok listrik untuk Grup Krakatau Steel, tetapi juga industri sekitar. Saat ini tercatat terdapat 2.473 pelanggan yang menikmati pasokan setrum dari KDL. Secara internal, pihaknya telah berupaya untuk tidak menaikkan tarif listriknya. Namun, dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung tarif listrik yang kompetitif, pihaknya berharap juga dapat memperoleh insentif ini.

“Hari ini KDL beli gas dengan harga US\$ 8,55 per MMBTU, jadi kami senang KDL sudah di-exercise untuk jadi US\$ 6 per MMBTU dan tinggal tunggu Kepmen,” tuturnya. Pihaknya berharap implementasi harga gas US\$ 6 per MMBTU untuk pembangkit listriknya ini bisa segera direalisasikan.

Ditambahkannya, saat ini KDL memang masih hanya memasok listrik sekitar 87 megawatt (MW). Namun, dengan pengembangan klaster baja 10 juta ton dan terus meningkatkan permintaan listrik lantaran harganya semakin kompetitif, produksi setrum ini diperkirakan akan melejit menjadi 391 MW pada 2028.

“Dalam lima tahun, kalau [harga gas] diturunkan jadi US\$ 6 per MMBTU, penghematannya bisa Rp 1,1 triliun dan ini sepenuhnya dinikmati pelanggan,” tegas Agus.

Kepmen ESDM Nomor 91 Tahun 2020 memungkinkan PT PLN (Persero) ataupun Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (BUPTL) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN, mendapatkan penyesuaian harga gas bumi di plant gate sebesar US\$ 6 per mmbtu. Dalam hal KDL, perusahaan tersebut memiliki Kerja Sama



Tutuka Ariadiji

Operasi (KSO) dengan PLN.

PGN Minta Insentif

Sementara itu, PGN menyebutkan adanya potensi penurunan pendapatan hingga US\$ 800 juta dalam kurun waktu 2020-2024 lantaran kebijakan harga gas khusus. PGN berharap dapat memperoleh insentif sebagai kompensasi implementasi kebijakan pemerintah ini.

Direktur Utama PGN Suko Hartono mengatakan, meski berstatus sebagai perusahaan terbuka, pihaknya berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah berupa implementasi harga gas khusus ke industri dan pembangkit listrik sebesar US\$ 6 per MMBTU. Pihaknya juga sudah melakukan efisiensi guna merealisasikan harga gas ini, salah satunya dengan integrasi fasilitas.

Namun, pihaknya juga turut berkorban agar kebijakan ini bisa jalan. “Pelaksanaan Kepmen [tentang harga gas], mungkin kami ada penurunan pendapatan hampir US\$ 100 juta, kalau sampai 2024 memang bisa sampai US\$ 800 juta,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (24/3).

Karenanya, lanjut Suko, pihaknya menagih insentif sebagaimana tercantum dalam Permen 8/2020 dan 10/2020. Pasalnya, hingga kini, pemerintah belum memastikan bentuk insentif yang menjadi hak PGN, apalagi memberikan insentif tersebut. Walaupun disebutkan bahwa salah satu bentuk insentif ini bisa berupa alokasi pasokan gas.

“Kami belum butuh alokasi gas karena industri belum tumbuh baik. Jadi yang kami mintakan lebih ke unutilized gas tadi bisa kami manfaatkan. Sampai hari ini baru itu [insentif] yang diminta,” ungkap Suko.

Dia menjelaskan, unutilized gas atau gas yang tidak dimanfaatkan ini lantaran serapan gas konsumen penerima harga khusus masih di bawah alokasi yang

ditetapkan. Padahal, secara teknis operasi, pasokan gas disebutnya tidak dapat dipisahkan antara alokasi sesuai Kepmen harga gas maupun di luar Kepmen.

Pihaknya mencatat realisasi serapan alokasi harga gas US\$ 6 per MMBTU baru mencapai 229,4 miliar british thermal unit per hari (*billion british thermal unit per day*/BBTUD) atau 61% dari alokasi untuk sektor industri tertentu dan 251,6 BBTUD atau 80% dari alokasi untuk pembangkit listrik.

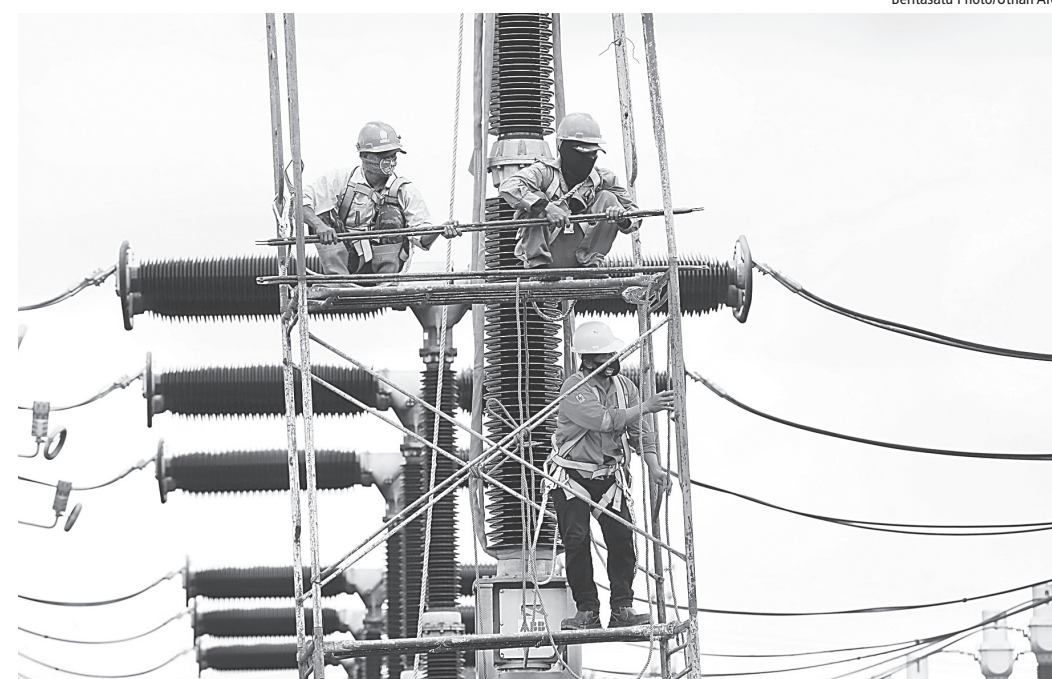
“Kami harapkan mestinya pemakaiannya bisa sampai 100% sehingga bisa mendorong industri di hilir untuk lebih berproduksi dan memberikan dampak multiplier membayar pajak,” tutur Suko.

Ke depannya, dengan membaik pertumbuhan ekonomi di 2021, pihaknya juga mengusulkan sejumlah insentif lain. Beberapa insentif ini yakni perubahan harga gas hulu untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga dari US\$ 4,7 per MMBTU menjadi US\$ 2 per MMBTU serta harga gas untuk sektor transportasi atau bahan bakar gas (BBG).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadiji membenarkan adanya unutilized gas dari alokasi Kepmen harga gas khusus. Dia juga mengakui bahwa alokasi yang tak terserap ini juga menjadi masalah bagi PGN, dan kemungkinan akan terulang lagi di tahun berikutnya. Pihaknya tengah membahas masalah ini dengan Kementerian Keuangan, tepatnya Direktorat Jenderal Anggaran. “Kami baru konsultasi volume gas [yang tidak terserap] ini dianggap sebagai apa, bisa tidak dianggap sebagai insentif. Ini bisa jadi ruang sebagai insentif,” jelasnya.

Secara prosedur, lanjutnya, pemberian insentif berupa hak untuk memanfaatkan unutilized gas itu membutuhkan adanya audit di PGN. Namun, pihaknya mencoba untuk memastikan terlebih dahulu bentuk dari insentif ini. Dari aspek hukum, pihaknya optimis pemberian insentif ini tidak ada masalah.

Terkait serapan gas harga khusus melalui PGN yang belum optimal, juga menjadi catatan pihaknya. Sejauh ini, industri menyampaikan bahwa serapan gas yang rendah lantaran dampak pandemi Covid-19. Tetapi pihaknya akan mengevaluasi hal ini terutama untuk penentuan kuota gas. “Itu berkaitan dengan keputusan kami ke depan,” ujar Tutuka.



Listrik Perbatasan

Petugas memperbaiki instalasi listrik di gardu transmisi Cinere, Depok, belum lama ini. PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan listrik bagi delapan desa di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). Demi listrik terang di perbatasan Indonesia dengan Malaysia tersebut, PLN menginvestasikan Rp 23 miliar atau sebesar Rp 35 juta bagi setiap kepala keluarga.

PLN Siapkan Keandalan Pasokan Listrik Jangka Panjang untuk Blok Rokan

JAKARTA – Sebagai pemegang Izin Usaha Penyaluran Tenaga Listrik (IUPTL) Blok Rokan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang menyiapkan keandalan jangka panjang pasokan listrik dan uap wilayah kerja blok Rokan. Hal ini menindaklanjuti komitmen sinergitas antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (SPJBTLU) antara PLN dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR) bulan Februari lalu.

Di sisi pasokan, kesiapan PLN didukung dengan sistem kelistrikan Pulau Sumatera saat ini yang memiliki Cadangan Daya sebesar 2.808 Mega Watt (MW), dengan daya mampu sebesar 8.852 MW dan beban puncak sebesar 6.044 MW.

Selain itu, guna menjamin keandalan pasokan listrik dan uap, PLN akan membangun 5x100 MW converter yang empat unit akan beroperasi secara kontinyu dan satu unit dalam posisi standby. Keandalan tersebut didukung dengan pasokan ke titik koneksi PLN-PHR melalui dua jalur transmisi 150 kV, yaitu dari sistem



Agung Murdifi

kelistrikan Pekanbaru (New Garuda Sakti-Balai Pungut) dan dari sistem kelistrikan Dumai (Duri - Balai Pungut).

Tak hanya itu, PLN juga menyiapkan skema pasokan backup (cadangan) apabila terjadi gangguan, dengan mengoptimalkan pembangkit eksisting di Balai Pungut dengan total daya mampu 250 MW.

Dalam melayani kebutuhan listrik dan uap Blok Rokan, PLN membagi dalam dua tahapan yakni masa transisi dan masa permanen.

“Sesuai SPJBTLU, masa layanan PLN dibagi menjadi

dua, yaitu masa transisi hanya selama 3 (tiga) tahun yang dimulai dari Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2024. Pada masa transisi ini, PLN akan mengelola pembangkit listrik eksisting yang saat ini telah melistriki wilayah kerja Rokan,” jelas *Executive Vice President* Komunikasi Korporat dan CSR Agung Murdifi.

Dirinya melanjutkan, layanan permanen akan diberikan mulai tanggal 8 Agustus 2024, yaitu dengan menginterkoneksi sistem kelistrikan pada wilayah kerja Rokan dengan interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera.

“Pada masa permanen, Blok Rokan akan pasok dari sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera dan uap akan pasok dengan pembangunan steam generator yang lebih andal. Kami juga menyiapkan opsi tambahan pasokan listrik dari PLTG relokasi. PLN akan memberikan pasokan listrik jangka panjang andal tanpa padam bagi PHR,” pungkas Agung.

Melalui pasokan listrik jangka panjang dari PLN, blok rokan akan memperoleh keandalan operasional yang terjamin dan biaya operasi yang lebih efisien. (es)

PLN Terima 134 Sertifikat Tanah

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerima 134 sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat untuk beberapa aset persil tanah tapak tower, gardu induk, bangunan PLTU/PLTD, kantor layanan dan lain-lain.

Seluruh aset yang diamankan atas kerja sama antara PLN, BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Sertifikasi dan Penertiban Aset PLN di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sebanyak 134 sertifikat tersebut diperoleh dari 27 kantor Badan BPN yang tersebar di Jawa Barat. Saat ini, jumlah aset PLN di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 8.490 persil dimana 3.555 persil nya belum tersertifikasi. Untuk mempercepat, PLN menargetkan sebanyak 2.057 persil di Jawa Barat telah selesai tersertifikasi pada tahun 2021.

Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali PLN, Haryanto WS, mengatakan kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dukungan tersebut diperkokoh oleh KPK, sehingga membuat PLN makin bersemangat memberikan aset-aset yang dikelolanya. Adanya sertifikasi aset ini menutup kemungkinan penyalahgunaan aset. Dengan demikian akan mengurangi potensi tindakan korupsi terhadap aset-aset tersebut.

“Pada tahun 2021 ini, kami menargetkan sertifikasi aset dapat terselesaikan sebanyak 71 persen, sehingga diharapkan di akhir tahun 2022 aset PLN akan 100 persen ber-

sertifikat. Secara nominal, aset tanah yang diselamatkan sampai hari ini sudah mencapai kurang lebih Rp 5 triliun,” kata Haryanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/3).

Sementara itu, PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB), yang memiliki sejumlah proyek serta aset di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sukabumi, mengungkapkan

harapan besar percepatan progres sertifikasi tanah di wilayah kerjanya yang berada di lingkungan Jawa Barat. “Di Jawa Barat ada proyek transmisi dan sejumlah aset. Ini yang kami kejar pengurusan sertifikasinya,” papar General Manager UIP JBB Ratnasari Sjamsuddin.

Ratnasari melanjutkan, adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini membuka jalan untuk kelancaran proses dan kerja sama antara unit-unit PLN dan BPN. (rap)

Pemerintah Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perizinan Turunan UU Cipta Kerja

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan aturan baru ini, Pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

“Setiap Kementerian dan Lembaga

melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pembukaan usaha, serta dapat menciptakan kepastian usaha,” jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam Webinar Perizinan Berusaha Ketenagalistrikan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, Rabu (24/3).

Secara umum peraturan ini juga

mengatur pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan pengawasan yang diamankan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Rida menyampaikan substansi pengaturan pembagian kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam PP ini antara lain kewenangan Pemerintah Pusat pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan

sendiri, jasa penunjang tenaga listrik, dan kewenangan Pemerintah Pusat pada bentuk penetapan atau persetujuan.

“Regulasi ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, serta jasa penunjang tenaga listrik untuk jasa penunjang tenaga listrik yang akan dijelaskan secara lebih detail oleh narasumber,” ujar Rida. (rap)

PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK

Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78, Jakarta 12910.
Telp. : (021) 57936733 (Hunting), Fax. (021) 57936730



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		TANGGAL 31 DESEMBER 2020	
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
ASET	31 Desember 2020 (Diaudit)	31 Desember 2019 (Diaudit)	LIABILITAS DAN EKUITAS
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	79.593.455.144	92.169.215.657	LIABILITAS JANGKA PENDEK
Piutang usaha jangka pendek - neto - pihak ketiga	11.393.752.015	19.035.299.862	Utang bank jangka pendek
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.058.879.158	2.877.541.942	Utang usaha - pihak ketiga
Persewaan	805.205.194.279	783.239.552.008	Utang pajak
Aset real estat	4.440.943.152	4.494.022.979	Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Utang muka dan beban dibayar di muka	10.267.072.055	8.818.889.913	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
Aset lancar lainnya	5.947.471.206	2.883.388.577	Liabilitas lain-lain
Total Aset Lancar	920.069.206.444	914.972.706.804	Total Liabilitas Jangka Pendek
			366.957.816.969
ASET TIDAK LANCAR			LIABILITAS JANGKA PANJANG
Piutang usaha jangka panjang - pihak ketiga	4.562.692.761	6.698.117.055	Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
Aset real estat	1.948.639.746.425	1.946.324.060.211	Utang bank
Aset tetap - neto	273.672.474.446	290.637.988.164	Utang lembaga keuangan
Properti investasi - neto	49.272.993.794	49.465.928.743	Jaminan keagamaan golf
Aset pajak tangguhan	5.468.690.151	4.879.304.939	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
Aset tidak lancar lainnya	225.000.000	225.000.000	Pendapatan bunga ditangguhkan
Total Aset Tidak Lancar	2.291.910.594.021	2.298.200.399.112	Penyisihan penggantian peralatan dan perlengkapan hotel
			Total Liabilitas Jangka Panjang
			186.947.485.077
			146.846.969.404
			LIABILITAS DAN EKUITAS
			LIABILITAS
			Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
			Modal saham - nilai nominal Rp 318 per saham
			Modal dasar - 6.000.000.000 saham
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.772.138.237 saham
			Tambahan modal disetor
			Utang muka pemesanan saham
			Saldo laba
			Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
			1.783.983.722.052
			Keperinganan Non-pengendali
			2.648.005.861.975
			2.833.695.416.892
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
			3.201.910.594.021
			3.213.173.105.916

Catatan:
1) Informasi keuangan konsolidasian di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disusun oleh Manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Koesasih, Nurdyaningrum, Tjahjoe & Rekan (firma anggota jaringan Crowe Global), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan mereka No. 00106/2.1051/AU.1/03/1029-21/10/2021 tertanggal 8 Maret 2021 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, telah diaudit oleh KAP Koesasih, Nurdyaningrum, Tjahjoe & Rekan (firma anggota jaringan Crowe Global), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan mereka No. 00106/2.1051/AU.1/03/1029-21/10/2020 tertanggal 6 Maret 2020 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
2) Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut.
3) Kurs tutup buku per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 14,105 dan Rp 13,901 untuk US\$ 1.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020	
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
	31 Desember 2020 (Diaudit)
PENDAPATAN	386.541.149.829
BEBAN POKOK PENDAPATAN	193.121.554.141
LABA KOTOR	193.419.595.687
Beban penjualan	(32.167.110.134)
Beban umum dan administrasi	(125.218.774.665)
Beban keuangan	(19.235.457.572)
Beban pajak final	(6.835.813.898)
Lain-lain - bersih	8.540.107.463
LABA SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	18.502.546.881
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	
Kiri	(385.139.541)
Tanggungan	589.385.212
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	204.245.611
LABA TAHUN BERJALAN	18.706.792.552
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya :	
Imbalan kerja	6.167.893.371
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	24.874.685.923
TOTAL LABA Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada:	
Pemilik Entitas Induk	(818.376.145)
Keperinganan Non-pengendali	19.056.309.778
TOTAL	18.706.792.552
TOTAL Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:	
Pemilik Entitas Induk	4.884.620.854
Keperinganan Non-pengendali	13.902.171.698
TOTAL	24.874.685.923
Labo (Rugi) Bersih per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	
	(0,17)
	5,27

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020	
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
	31 Desember 2020 (Diaudit)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan kas dari pelanggan	455.438.947.533
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(344.673.544.653)
Pembayaran beban keuangan	(18.022.234.318)
Pembayaran pajak penghasilan dan tagihan pajak	(8.426.909.920)
Penerimaan bunga	2.327.105.880
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	85.603.364.522
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	
Perolehan aset tetap	(2.992.847.968)
Perolehan properti investasi	(984.444.666)
Penjualan aset tetap	33.672.727
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.977.229.634)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan utang bank jangka panjang	10.817.550.204
Penerimaan utang bank jangka pendek	3.500.000.000
Pembayaran utang bank jangka panjang	(63.962.329.821)
Pembayaran utang lembaga keuangan	(1.439.506.729)
Pembayaran dari aset pengumpulan pajak	(564.500.000)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(51.648.798.346)
KEMAIKAN BERSIH KAS, SETARA KAS, DAN CERUKAN	29.977.285.542
KAS, SETARA KAS, DAN CERUKAN AWAL TAHUN	49.616.169.602
KAS, SETARA KAS, DAN CERUKAN AKHIR TAHUN	79.593.455.144
Kas dan setara kas dan cerukan terdiri dari:	
Kas dan setara kas	79.593.455.144
Cerukan	(42.553.046.655)
Total	79.593.455.144

Jakarta, 25 Maret 2021

PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk
DIREKSI